

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pusat Desak DKI Bebaskan Lahan Ciliwung

Dinas Sumber Daya Air menargetkan eksekusi 118 bidang tanah mulai April mendatang.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendesak Pemerintah Provinsi DKI menuntaskan pembebasan lahan di sepanjang bantaran Ciliwung. Bidang-bidang tanah di ruas T.B. Simatupang hingga Manggarai itu dibutuhkan untuk normalisasi sungai yang membelah Jakarta tersebut.

Normalisasi Ciliwung merupakan pekerjaan pemerintah pusat. Namun pembebasan lahannya menjadi kewajiban pemerintah DKI. Proyek ini mandek sejak Anies Baswedan menjabat gubernur pada 2017.

Menurut Direktur Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum Jarot Widyoko, mereka siap melanjutkan proyek yang baru rampung 16 kilometer dari target sepanjang 33 kilometer itu. "Intinya begini, sekarang masih sisa 17 kilometer. Jadi mana yang sudah ditertibkan, kami masuk," kata Jarot, kemarin.

Jarot menyatakan, sejak DKI menghentikan pembebasan lahan normalisasi Ciliwung, Kementerian mengembalikan Rp 40 miliar dana anggaran ke kas negara. Padahal, dia melanjutkan, mereka sudah membeli sebagian besar kebutuhan *sheet pile* untuk pembangunan tembok atau penahan badan sungai. Menurut dia, konsep normalisasi

pemerintah termasuk pembangunan parapen atau tebing sebagai penjaga kapasitas air di aliran sungai tersebut. "Mohon (Pemprov DKI) segera kembalikan lahan agar sepadan Ciliwung bebas dari permukiman," ujar dia.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf mengatakan proyek tersebut sempat terhambat masalah anggaran. Menurut dia, DKI telah berniat membebaskan lahan 118 bidang tanah sepadan Ciliwung di empat kelurahan pada tahun lalu. Namun dana pembebasan lahan batal cair karena pemerintah DKI mengalami defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.

Meski demikian, Juaini menambahkan, Dinas Sumber Daya Air kembali mengajukan anggaran penanganan banjir berupa pembebasan lahan di sepadan sungai dan waduk pada tahun anggaran ini. Jumlahnya mencapai Rp 600 miliar. Dari angka tersebut, Rp 160 miliar akan digunakan untuk membayar ganti rugi lahan 118 bidang tanah milik masyarakat di sepadan Ciliwung. "Targetnya, sudah bisa dimulai April mendatang," kata dia.

Lokasi pembebasan lahan tersebut, kata Juaini, tersebar di Kelurahan Balekambang, Pejaten Timur, Cililitan, dan Tanjung Barat. Setelah itu, pemerintah DKI akan mulai bernegosiasi kembali dengan pemilik

bidang tanah lainnya yang menjadi lokasi proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Saat ini, Juaini melanjutkan, DKI sudah mengeluarkan penetapan lokasi pembebasan lahan. Namun pembayaran lahan baru bisa dilakukan setelah ada kelengkapan syarat dan administrasi dari pemilik bidang tanah, seperti kelengkapan surat dan penuntasan kewajiban pajak. "Kami juga harus melihat nilai jual obyek pajak yang mau naik lagi," kata dia.

"Mungkin anggaran akan ditinjau ulang."

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah menyatakan terhentinya normalisasi Ciliwung membawa dampak besar bagi penanganan banjir di Ibu Kota. Dia menilai proyek yang digagas pada 2013 tersebut seharusnya sudah menyelesaikan proses pembebasan lahan dua tahun lalu.

Dinamika perubahan kebijakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ke Anies Baswedan, dia melanjutkan, berbuntut pada ketinggian banjir di permukiman sepanjang Ciliwung. "Saya tidak membandingkan," kata Bambang. "Kalau sudah dinormalisasi, memang bukan berarti sama sekali tak ada banjir. Tapi jumlah air tergenang atau banjirnya lebih sedikit dan cepat surut."

● IMAM HAMDI